

Nomor : 3736/D.3/PDP.07.1
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Dokumen
Hal : Perpindahan Platform Swakelola
Belajar Orientasi PPPK

Jakarta, 11 Agustus 2025

- Yth. :
1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga;
 2. Kepala Biro SDM Kementerian/Lembaga;
 3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi; dan
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Mengingat pentingnya Penyelenggaraan Orientasi PPPK khususnya Kurikulum I yaitu Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN, saat ini Lembaga Administrasi Negara (LAN) bermaksud mengoptimalkan sistem pembelajaran mandiri yang dikelola oleh LAN. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Orientasi PPPK Kurikulum I yaitu Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN menggunakan platform Swakelola Belajar (Swajar) Orientasi PPPK yang disediakan oleh LAN. Swajar Orientasi PPPK saat ini beralamat di tautan: <https://swajar-ppkpintar.lan.go.id/> , namun **per tanggal 13 Agustus 2025 sistem tersebut akan ditutup dan tidak lagi bisa diakses** untuk registrasi peserta baru. Untuk peserta yang sudah register sebelum tanggal pada poin 2, tetap bisa melanjutkan proses belajarnya, mengunggah jurnal, melakukan evaluasi, dan generate sertifikat pada sistem Swajar tersebut.
2. Selanjutnya bagi peserta baru dapat mulai mengakses pembelajaran Orientasi PPPK Kurikulum I yaitu Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui Swajar Orientasi PPPK yang baru, melalui tautan: <https://sibangkom.lan.go.id/pembelajaran-wajib/login>. Peserta login dengan menggunakan NIP (tanpa spasi) sebagai username dan NIK (tanpa spasi) sebagai password. Panduan Swajar PPPK baru dapat diakses melalui tautan https://s.id/Sibangkom_Tutorial_Swajar_PPPK. **Sistem Swajar Orientasi PPPK yang baru bisa diakses mulai tanggal 19 Agustus 2025.**
3. Pembelajaran Orientasi PPPK Kurikulum I yaitu Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN melalui Swajar PPPK tidak dipungut biaya (Rp. 0).

4. Lembaga Penyelenggara dilarang keras membebankan kepada Peserta semua jenis biaya yang terkait dengan Orientasi PPPK, baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan maupun pasca Orientasi PPPK.
5. Pembebanan biaya Orientasi PPPK kepada Peserta jelas merupakan bentuk pungutan liar dan tindakan melawan hukum, apabila terbukti ditemukan adanya pungutan liar, LAN akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Untuk informasi dan hal lain terkait teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Orientasi PPPK melalui Swajar Orientasi PPPK ini dapat menghubungi: Sdr. Fani Heru Wismono (081347166988).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Penyelenggaraan
Pengembangan Kapasitas ASN,



Tri Widodo Wahyu Utomo

Tembusan:
Kepala LAN

Lampiran I

Surat Deputi Bidang
Penyelenggaraan Pengembangan
Kapasitas ASN

Nomor: 3736/D.3/PDP.07.1

Daftar Instansi Penerima:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi
6. Komisi Yudisial
7. Tentara Negara Indonesia
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. Kejaksaan Agung
10. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
11. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
12. Kementerian Koordinator Bidang Pangan
13. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
14. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
15. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
17. Kementerian Agama
18. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
19. Kementerian Kepala Badan Usaha Milik Negara
20. Kementerian Dalam Negeri
21. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
22. Kementerian Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Ekonomi Kreatif
23. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Kementerian Hak Asasi Manusia
25. Kementerian Hukum
26. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
27. Kementerian Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
28. Kementerian Kebudayaan
29. Kementerian Kehutanan
30. Kementerian Kelautan dan Perikanan
31. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
32. Kementerian Kesehatan
33. Kementerian Ketenagakerjaan
34. Kementerian Keuangan
35. Kementerian Komunikasi dan Digital
36. Kementerian Koperasi
37. Kementerian Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
38. Kementerian Luar Negeri
39. Kementerian Pariwisata
40. Kementerian Pekerjaan Umum

41. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
42. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43. Kementerian Pemuda dan Olahraga
44. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
45. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
46. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
47. Kementerian Perdagangan
48. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
49. Kementerian Perhubungan
50. Kementerian Perindustrian
51. Kementerian Pertahanan
52. Kementerian Pertanian
53. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
54. Kementerian Sekretariat Negara
55. Kementerian Sosial
56. Kementerian Transmigrasi
57. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
58. Dewan Pertahanan Nasional
59. Arsip Nasional Republik Indonesia
60. Badan Gizi Nasional
61. Badan Informasi Geospasial
62. Badan Intelijen Negara
63. Badan Karantina Indonesia
64. Badan Keamanan Laut
65. Badan Kepegawaian Negara
66. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
67. Badan Narkotika Nasional
68. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
69. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
70. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
71. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
72. Badan Pangan Nasional
73. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
74. Badan Pengawas Obat dan Makanan
75. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
76. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
77. Badan Pengawasan Pemilihan Umum
78. Badan Pusat Statistik
79. Badan Riset dan Inovasi Nasional
80. Badan Siber dan Sandi Negara
81. Badan Standarisasi Nasional
82. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
83. Lembaga Ketahanan Nasional
84. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
85. Ombudsman Republik Indonesia
86. Otorita Ibu Kota Nusantara
87. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
88. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
89. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
90. Komisi Pemberantasan Korupsi
91. Badan Pemeriksa Keuangan
92. Komisi Pemilihan Umum
93. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
94. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

95. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
96. Badan Penyelenggara Haji
97. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
98. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
99. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
100. Lembaga Sensor Film
101. Pemerintah Provinsi Aceh
102. Pemerintah Provinsi Bali
103. Pemerintah Provinsi Banten
104. Pemerintah Provinsi Bengkulu
105. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
106. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
107. Pemerintah Provinsi Gorontalo
108. Pemerintah Provinsi Jambi
109. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
110. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
111. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
112. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
113. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
114. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
115. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
116. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
117. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
118. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
119. Pemerintah Provinsi Lampung
120. Pemerintah Provinsi Maluku
121. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
122. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
123. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
124. Pemerintah Provinsi Papua
125. Pemerintah Provinsi Papua Barat
126. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
127. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
128. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
129. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
130. Pemerintah Provinsi Riau
131. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
132. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
133. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
134. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
135. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
136. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
137. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
138. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
139. Pemerintah Kota Ambon
140. Pemerintah Kota Balikpapan
141. Pemerintah Kota Banda Aceh
142. Pemerintah Kota Bandar Lampung
143. Pemerintah Kota Bandung
144. Pemerintah Kota Banjar
145. Pemerintah Kota Banjarbaru
146. Pemerintah Kota Banjarmasin
147. Pemerintah Kota Batam
148. Pemerintah Kota Batu
149. Pemerintah Kota Baubau
150. Pemerintah Kota Bekasi

151. Pemerintah Kota Bengkulu
152. Pemerintah Kota Bima
153. Pemerintah Kota Binjai
154. Pemerintah Kota Bitung
155. Pemerintah Kota Blitar
156. Pemerintah Kota Bogor
157. Pemerintah Kota Bontang
158. Pemerintah Kota Bukittinggi
159. Pemerintah Kota Cilegon
160. Pemerintah Kota Cimahi
161. Pemerintah Kota Cirebon
162. Pemerintah Kota Denpasar
163. Pemerintah Kota Depok
164. Pemerintah Kota Dumai
165. Pemerintah Kota Gorontalo
166. Pemerintah Kota Gunungsitoli
167. Pemerintah Kota Jambi
168. Pemerintah Kota Jayapura
169. Pemerintah Kota Kediri
170. Pemerintah Kota Kendari
171. Pemerintah Kota Kotamobagu
172. Pemerintah Kota Kupang
173. Pemerintah Kota Langsa
174. Pemerintah Kota Lhokseumawe
175. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
176. Pemerintah Kota Madiun
177. Pemerintah Kota Magelang
178. Pemerintah Kota Makassar
179. Pemerintah Kota Malang
180. Pemerintah Kota Manado
181. Pemerintah Kota Mataram
182. Pemerintah Kota Medan
183. Pemerintah Kota Metro
184. Pemerintah Kota Mojokerto
185. Pemerintah Kota Padang
186. Pemerintah Kota Padang Panjang
187. Pemerintah Kota Padangsidempuan
188. Pemerintah Kota Pagar Alam
189. Pemerintah Kota Palangkaraya
190. Pemerintah Kota Palembang
191. Pemerintah Kota Palopo
192. Pemerintah Kota Palu
193. Pemerintah Kota Pangkal Pinang
194. Pemerintah Kota Parepare
195. Pemerintah Kota Pariaman
196. Pemerintah Kota Pasuruan
197. Pemerintah Kota Payakumbuh
198. Pemerintah Kota Pekalongan
199. Pemerintah Kota Pekanbaru
200. Pemerintah Kota Pematangsiantar
201. Pemerintah Kota Pontianak
202. Pemerintah Kota Prabumulih
203. Pemerintah Kota Probolinggo
204. Pemerintah Kota Sabang
205. Pemerintah Kota Salatiga
206. Pemerintah Kota Samarinda
207. Pemerintah Kota Sawahlunto

208. Pemerintah Kota Semarang
209. Pemerintah Kota Serang
210. Pemerintah Kota Sibolga
211. Pemerintah Kota Singkawang
212. Pemerintah Kota Solok
213. Pemerintah Kota Sorong
214. Pemerintah Kota Subulussalam
215. Pemerintah Kota Sukabumi
216. Pemerintah Kota Sungai Penuh
217. Pemerintah Kota Surabaya
218. Pemerintah Kota Surakarta
219. Pemerintah Kota Tangerang
220. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
221. Pemerintah Kota Tanjung Balai
222. Pemerintah Kota Tanjungpinang
223. Pemerintah Kota Tarakan
224. Pemerintah Kota Tasikmalaya
225. Pemerintah Kota Tebing Tinggi
226. Pemerintah Kota Tegal
227. Pemerintah Kota Ternate
228. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
229. Pemerintah Kota Tomohon
230. Pemerintah Kota Tual
231. Pemerintah Kota Yogyakarta
232. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
233. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
234. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
235. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
236. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
237. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
238. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
239. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
240. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
241. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
242. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
243. Pemerintah Kabupaten Agam
244. Pemerintah Kabupaten Alor
245. Pemerintah Kabupaten Asahan
246. Pemerintah Kabupaten Asmat
247. Pemerintah Kabupaten Badung
248. Pemerintah Kabupaten Balangan
249. Pemerintah Kabupaten Bandung
250. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
251. Pemerintah Kabupaten Banggai
252. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
253. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
254. Pemerintah Kabupaten Bangka
255. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
256. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
257. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
258. Pemerintah Kabupaten Bangkalan
259. Pemerintah Kabupaten Bangli
260. Pemerintah Kabupaten Banjar
261. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
262. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
263. Pemerintah Kabupaten Bantul
264. Pemerintah Kabupaten Banyuasin

265. Pemerintah Kabupaten Banyumas
266. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
267. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
268. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
269. Pemerintah Kabupaten Barito Timur
270. Pemerintah Kabupaten Barito Utara
271. Pemerintah Kabupaten Barru
272. Pemerintah Kabupaten Batang
273. Pemerintah Kabupaten Batanghari
274. Pemerintah Kabupaten Batu Bara
275. Pemerintah Kabupaten Bekasi
276. Pemerintah Kabupaten Belitung
277. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
278. Pemerintah Kabupaten Belu
279. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
280. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
281. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
282. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
283. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
284. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
285. Pemerintah Kabupaten Berau
286. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
287. Pemerintah Kabupaten Bima
288. Pemerintah Kabupaten Bintan
289. Pemerintah Kabupaten Bireuen
290. Pemerintah Kabupaten Blitar
291. Pemerintah Kabupaten Blora
292. Pemerintah Kabupaten Boalemo
293. Pemerintah Kabupaten Bogor
294. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
295. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
296. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
297. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
298. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
299. Pemerintah Kabupaten Bombana
300. Pemerintah Kabupaten Bondowoso
301. Pemerintah Kabupaten Bone
302. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
303. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
304. Pemerintah Kabupaten Boyolali
305. Pemerintah Kabupaten Brebes
306. Pemerintah Kabupaten Buleleng
307. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
308. Pemerintah Kabupaten Bulungan
309. Pemerintah Kabupaten Bungo
310. Pemerintah Kabupaten Buol
311. Pemerintah Kabupaten Buru
312. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
313. Pemerintah Kabupaten Buton
314. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan
315. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
316. Pemerintah Kabupaten Buton Utara
317. Pemerintah Kabupaten Ciamis
318. Pemerintah Kabupaten Cianjur
319. Pemerintah Kabupaten Cilacap
320. Pemerintah Kabupaten Cirebon
321. Pemerintah Kabupaten Dairi

322. Pemerintah Kabupaten Deiyai
323. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
324. Pemerintah Kabupaten Demak
325. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
326. Pemerintah Kabupaten Dogiyai
327. Pemerintah Kabupaten Dompu
328. Pemerintah Kabupaten Donggala
329. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
330. Pemerintah Kabupaten Ende
331. Pemerintah Kabupaten Enrekang
332. Pemerintah Kabupaten Fakfak
333. Pemerintah Kabupaten Flores Timur
334. Pemerintah Kabupaten Garut
335. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
336. Pemerintah Kabupaten Gianyar
337. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
338. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
339. Pemerintah Kabupaten Gowa
340. Pemerintah Kabupaten Gresik
341. Pemerintah Kabupaten Grobogan
342. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
343. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
344. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
345. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
346. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
347. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
348. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
349. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
350. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
351. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
352. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
353. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
354. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
355. Pemerintah Kabupaten Indramayu
356. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
357. Pemerintah Kabupaten Jayapura
358. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
359. Pemerintah Kabupaten Jember
360. Pemerintah Kabupaten Jembrana
361. Pemerintah Kabupaten Jenepono
362. Pemerintah Kabupaten Jepara
363. Pemerintah Kabupaten Jombang
364. Pemerintah Kabupaten Kaimana
365. Pemerintah Kabupaten Kampar
366. Pemerintah Kabupaten Kapuas
367. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
368. Pemerintah Kabupaten Karanganyar
369. Pemerintah Kabupaten Karangasem
370. Pemerintah Kabupaten Karawang
371. Pemerintah Kabupaten Karimun
372. Pemerintah Kabupaten Karo
373. Pemerintah Kabupaten Katingan
374. Pemerintah Kabupaten Kaur
375. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
376. Pemerintah Kabupaten Kebumen
377. Pemerintah Kabupaten Kediri
378. Pemerintah Kabupaten Keerom

379. Pemerintah Kabupaten Kendal
380. Pemerintah Kabupaten Kepahiang
381. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
382. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
383. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
384. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
385. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
386. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
387. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
388. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
389. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
390. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
391. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
392. Pemerintah Kabupaten Kerinci
393. Pemerintah Kabupaten Ketapang
394. Pemerintah Kabupaten Klaten
395. Pemerintah Kabupaten Klungkung
396. Pemerintah Kabupaten Kolaka
397. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
398. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
399. Pemerintah Kabupaten Konawe
400. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
401. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
402. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
403. Pemerintah Kabupaten Kotabaru
404. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
405. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
406. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
407. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
408. Pemerintah Kabupaten Kudus
409. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
410. Pemerintah Kabupaten Kuningan
411. Pemerintah Kabupaten Kupang
412. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
413. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
414. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
415. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
416. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
417. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara
418. Pemerintah Kabupaten Lahat
419. Pemerintah Kabupaten Lamandau
420. Pemerintah Kabupaten Lamongan
421. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
422. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
423. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
424. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
425. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
426. Pemerintah Kabupaten Landak
427. Pemerintah Kabupaten Langkat
428. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
429. Pemerintah Kabupaten Lebak
430. Pemerintah Kabupaten Lebong
431. Pemerintah Kabupaten Lembata
432. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
433. Pemerintah Kabupaten Lingga
434. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
435. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

436. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
437. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
438. Pemerintah Kabupaten Lumajang
439. Pemerintah Kabupaten Luwu
440. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
441. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
442. Pemerintah Kabupaten Madiun
443. Pemerintah Kabupaten Magelang
444. Pemerintah Kabupaten Magetan
445. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
446. Pemerintah Kabupaten Majalengka
447. Pemerintah Kabupaten Majene
448. Pemerintah Kabupaten Malaka
449. Pemerintah Kabupaten Malang
450. Pemerintah Kabupaten Malinau
451. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
452. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
453. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
454. Pemerintah Kabupaten Mamasa
455. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
456. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
457. Pemerintah Kabupaten Mamuju
458. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
459. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
460. Pemerintah Kabupaten Manggarai
461. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
462. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
463. Pemerintah Kabupaten Manokwari
464. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
465. Pemerintah Kabupaten Mappi
466. Pemerintah Kabupaten Maros
467. Pemerintah Kabupaten Maybrat
468. Pemerintah Kabupaten Melawi
469. Pemerintah Kabupaten Mempawah
470. Pemerintah Kabupaten Merangin
471. Pemerintah Kabupaten Merauke
472. Pemerintah Kabupaten Mesuji
473. Pemerintah Kabupaten Mimika
474. Pemerintah Kabupaten Minahasa
475. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
476. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
477. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
478. Pemerintah Kabupaten Mojokerto
479. Pemerintah Kabupaten Morowali
480. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
481. Pemerintah Kabupaten Muara Enim
482. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi
483. Pemerintah Kabupaten Mukomuko
484. Pemerintah Kabupaten Muna
485. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
486. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
487. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
488. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
489. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara
490. Pemerintah Kabupaten Nabire
491. Pemerintah Kabupaten Nagan raya
492. Pemerintah Kabupaten Nagekeo

493. Pemerintah Kabupaten Natuna
494. Pemerintah Kabupaten Nduga
495. Pemerintah Kabupaten Ngada
496. Pemerintah Kabupaten Nganjuk
497. Pemerintah Kabupaten Ngawi
498. Pemerintah Kabupaten Nias
499. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
500. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
501. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
502. Pemerintah Kabupaten Nunukan
503. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
504. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
505. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
506. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
507. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
508. Pemerintah Kabupaten Pacitan
509. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
510. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
511. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
512. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
513. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
514. Pemerintah Kabupaten Pandeglang
515. Pemerintah Kabupaten Pangandaran
516. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
517. Pemerintah Kabupaten Paniai
518. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
519. Pemerintah Kabupaten Pasaman
520. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
521. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
522. Pemerintah Kabupaten Paser
523. Pemerintah Kabupaten Pasuruan
524. Pemerintah Kabupaten Pati
525. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
526. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
527. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
528. Pemerintah Kabupaten Pelalawan
529. Pemerintah Kabupaten Pematang
530. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
531. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
532. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
533. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
534. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
535. Pemerintah Kabupaten Pidie
536. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
537. Pemerintah Kabupaten Pinrang
538. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
539. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
540. Pemerintah Kabupaten Ponorogo
541. Pemerintah Kabupaten Poso
542. Pemerintah Kabupaten Pringsewu
543. Pemerintah Kabupaten Probolinggo
544. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
545. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
546. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
547. Pemerintah Kabupaten Puncak
548. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
549. Pemerintah Kabupaten Purbalingga

550. Pemerintah Kabupaten Purwakarta
551. Pemerintah Kabupaten Purworejo
552. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
553. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
554. Pemerintah Kabupaten Rembang
555. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
556. Pemerintah Kabupaten Rokan hulu
557. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
558. Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
559. Pemerintah Kabupaten Sambas
560. Pemerintah Kabupaten Samosir
561. Pemerintah Kabupaten Sampang
562. Pemerintah Kabupaten Sanggau
563. Pemerintah Kabupaten Sarmi
564. Pemerintah Kabupaten Sarolangun
565. Pemerintah Kabupaten Sekadau
566. Pemerintah Kabupaten Seluma
567. Pemerintah Kabupaten Semarang
568. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
569. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
570. Pemerintah Kabupaten Serang
571. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
572. Pemerintah Kabupaten Seruyan
573. Pemerintah Kabupaten Siak
574. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
575. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
576. Pemerintah Kabupaten Sigi
577. Pemerintah Kabupaten Sijunjung
578. Pemerintah Kabupaten Sikka
579. Pemerintah Kabupaten Simalungun
580. Pemerintah Kabupaten Simeulue
581. Pemerintah Kabupaten Sinjai
582. Pemerintah Kabupaten Sintang
583. Pemerintah Kabupaten Situbondo
584. Pemerintah Kabupaten Sleman
585. Pemerintah Kabupaten Solok
586. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
587. Pemerintah Kabupaten Soppeng
588. Pemerintah Kabupaten Sorong
589. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
590. Pemerintah Kabupaten Sragen
591. Pemerintah Kabupaten Subang
592. Pemerintah Kabupaten Sukabumi
593. Pemerintah Kabupaten Sukamara
594. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
595. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
596. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
597. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
598. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
599. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
600. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
601. Pemerintah Kabupaten Sumedang
602. Pemerintah Kabupaten Sumenep
603. Pemerintah Kabupaten Supiori
604. Pemerintah Kabupaten Tabalong
605. Pemerintah Kabupaten Tabanan
606. Pemerintah Kabupaten Takalar

607. Pemerintah Kabupaten Tambrauw
608. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
609. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
610. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
611. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
612. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
613. Pemerintah Kabupaten Tangerang
614. Pemerintah Kabupaten Tanggamus
615. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
616. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
617. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
618. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
619. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
620. Pemerintah Kabupaten Tapin
621. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
622. Pemerintah Kabupaten Tebo
623. Pemerintah Kabupaten Tegal
624. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
625. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
626. Pemerintah Kabupaten Temanggung
627. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
628. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara
629. Pemerintah Kabupaten Toba
630. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una
631. Pemerintah Kabupaten Tolikara
632. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
633. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
634. Pemerintah Kabupaten Trenggalek
635. Pemerintah Kabupaten Tuban
636. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
637. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
638. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
639. Pemerintah Kabupaten Wajo
640. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
641. Pemerintah Kabupaten Waropen
642. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
643. Pemerintah Kabupaten Wonogiri
644. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
645. Pemerintah Kabupaten Yahukimo
646. Pemerintah Kabupaten Yalimo